

1) **Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat**

a) **Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat**

(1) **Kondisi Umum**

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah pada dasarnya akan terwujud jika di daerah dimaksud dapat tercipta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dimana di daerah itu terdapat keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melaksanakan pelbagai kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Keadaan dinamis seperti itu tentu hanya dimungkinkan apabila peraturan daerah maupun turunannya dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat. Keadaan ini diharapkan mampu mendukung terciptanya iklim berinvestasi di Kabupaten Bantul. Pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja berupaya mewujudkan sasaran strategis daerah “Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis” dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Bantul “Persentase penanganan gangguan ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat”. Untuk mewujudkan IKU Bupati Bantul tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan sasaran strategis perangkat daerah yaitu “Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat” dengan IKU perangkat daerah “Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan”.

Keberhasilan Pelaksanaan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023 Terhadap Target Akhir RPJMD (2026)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2023				Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian terhadap target akhir RPJMD (2026)
			Capaian 2022	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	persentase	100	100	100	100	100	

Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2023

Tabel di atas menunjukkan persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan tercapai 100% dari target. Nilai capaian tahun 2023 ini sama dengan tahun 2022. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan merupakan penanganan aduan yang ditindaklanjuti oleh Satpol PP terhadap jumlah aduan pelanggaran perda/perkada yang masuk. Jumlah aduan yang masuk dan ditangani pada tahun 2023 sebanyak 66. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi bagi Satpol PP Kabupaten Bantul sebagai penyelenggara trantibumlinmas untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis.

Faktor pendorong tercapainya sasaran tersebut diantaranya:

1. Adanya dasar hukum yang jelas;
2. Koordinasi lintas sektor dan antar stakeholder yang baik;
3. Adanya penyelenggaraan bimtek peningkatan kapasitas anggota Satpol PP; dan
4. Adanya dukungan masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.

Sedangkan faktor penghambat diantaranya :

1. Kewanangan diklat PPNS harus melibatkan lintas sektor sehingga diklat PPNS terbatas dan
2. Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan trantibumlinmas belum memadai.

## (2) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi serta solusi dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat pada tahun 2023 disajikan pada tabel pemetaan permasalahan dan solusi sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Pemetaan Solusi dalam Permasalahan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi sebanyak 18 sedangkan Perda dan Perkada yang ditegakkan sebanyak 14	Pelaksanaan penegakan Perda, Perkada, dan kebijakan daerah lainnya dengan melibatkan lintas sektor
2.	Masih terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Peningkatan patroli pengamanan dalam rangka pencegahan gangguan ketertiban dan ketenteraman umum
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

		Peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat melalui sosialisasi, dan pembentukan jaga warga
		Pemberdayaan mitra kerja dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat
		Peningkatan kapasitas anggota linmas

**b) Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Alokasi anggaran Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2023 sebesar Rp12.942.609.676,- yang dibagi dalam 3 program, 11 kegiatan, dan 30 subkegiatan. Realisasi belanja tahun 2023 adalah Rp12.526.007.433,- atau 96,78% dan realisasi fisik sebesar 99,81%. Deviasi fisik dan keuangan berasal dari tidak tercapainya kinerja subkegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada, sub kegiatan ini untuk pemberian ganti rugi tetapi juknisnya belum jelas.

Selanjutnya rincian capaian kinerja program kegiatan dan sub kegiatan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

No.	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1.	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	79	81,67
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	100
				Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4
				Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100	100
				Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	41	41

No.	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
				Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	3	3
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	100	100
				Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1
				Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	235	235
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persentase	100	100
				Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12

No.	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
				Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12
				Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12
				Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100	100
				Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	20
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	100
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12



No.	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persentase	100	100
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	52	52
				Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	49	49
				Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1
				Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persentase	100	100
				Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	Persentase	100	100

No.	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
				Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus	300	300
				Sub kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	300	300



No.	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
				Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	12	12
				Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	12	12
				Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	1440	1440

No.	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
				Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	26	26
				Sub kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	12	12
				Sub kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	1	1
				Sub kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	12	0
				Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Kepala	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	Persentase	100	100

No.	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
				Sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Laporan	12	12
				Sub kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	12	12
				Sub kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	12	12
				Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga	Persentase	86,17	86,17

No.	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
				Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di Pedukuhan	Pedukuhan	155	155
				Sub kegiatan Pembinaan Jagawarga	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	Orang	3.875	3.875